

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi telah melahirkan situasi kehidupan yang kompetitif di antara berbagai negara di dunia ini. Tingkat kesiapan setiap negara dalam menghadapi fenomena kehidupan yang kompetitif, amat tergantung kepada daya dukung yang dimilikinya, terutama menyangkut aspek kualitas sumber daya manusia. Negara yang mempunyai sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepribadian yang mantap, mempunyai peluang untuk mengambil manfaat dari era globalisasi (kesejagatan) tersebut. Namun bagi negara-negara yang miskin dengan sumber daya manusia yang mempunyai ciri-ciri di atas, akan terpuruk dalam ketakberdayaan, atau "cengkraman" negara lain.

Agar tidak menjadi negara yang terpuruk ke dalam ketakberdayaan tersebut, maka upaya untuk menyiapkan manusia Indonesia yang mampu beradaptasi secara dinamik dan konstruktif terhadap situasi global, merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menyadari pentingnya masalah ini, maka mulai Pembangunan Jangka Panjang II, pemerintah telah meletakkan prioritas pembangunan dalam bidang pendidikan di samping bidang ekonomi.

Pembangunan bidang pendidikan ini diarahkan kepada peningkatan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan perluasan peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, termasuk di daerah terpencil (GBHN 1993).

Sehubungan dengan upaya pengembangan sumber daya manusia (PSDM) ini, Wardiman Djojonegoro dan Ace Suryadi (1995 : 225) mengemukakan sebagai berikut.

Ciri yang sangat penting dari PJP II adalah penekanan yang sangat kuat pada pengembangan sumber daya manusia. Penekanan pada PSDM yang muncul dalam semua sektor-subsektor pembangunan tersebut, membuktikan bahwa kita memiliki komitmen yang sangat besar untuk mencapai keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Sementara itu, di hadapan peserta Rakernas Depdikbud di Jakarta, pada tanggal 19 Mei 1996 (Pikiran Rakyat, 23 Mei 1996), Presiden mengemukakan sebagai berikut.

Disadari bahwa kesiapan Indonesia dalam memasuki zaman ekonomi terbuka dan persaingan bebas pada awal abad 21 mendatang akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam meningkatkan produktivitas nasional. Sedangkan produktivitas nasional, hanya akan terwujud jika sumber daya manusia Indonesia profesional dan menguasai keterampilan, keahlian, serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang semakin beragam.

Upaya untuk mencapai keunggulan kualitas sumber daya manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang, yang sering disebut juga keunggulan kompetitif, telah menjadi pendorong yang kuat bagi sektor pendidikan untuk senantiasa memperbaiki, menata, dan meningkatkan mutu, baik proses maupun hasil.

Tidak terpujungi lagi bahwa peran pendidikan sangat strategis dalam mengembangkan mutu sumber daya manusia, namun disisi lain kondisi pendidikan itu sendiri masih terbelenggu oleh berbagai masalah. Masalah-masalah itu menyangkut (1) banyaknya peserta didik yang putus sekolah, karena faktor kemiskinan, (2) rendahnya mutu akademik, (3) rendahnya efisiensi internal: banyak yang mengulang kelas, dan lamanya studi melampaui batas waktu standar, (4) efisiensi eksternal (relevansi pendidikan), dan (5) kecenderungan menurunnya akhlak dan moral (Hidayat syarif, 1997 : 15-16).

Sementara H.A.R. Tilaar (1992 : 150-153) mengemukakan bahwa dewasa ini pendidikan di Indonesia sedang mengalami empat krisis pokok, yaitu : (1) kualitas pendidikan : mutu guru masih rendah pada semua jenjang, dan belum memadainya alat-alat bantu PBM (buku teks, peralatan laboratorium, dan bengkel kerja), (2) relevansi pendidikan, (3) elitisme, dan (4) manajemen pendidikan.

Upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan ini, lebih dipacu lagi dengan munculnya berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan yang paling mendasar adalah pentingnya orientasi nilai tambah, perubahan struktur masyarakat, pengaruh globalisasi, dan kolonialisme dalam penguasaan Iptek (Wardiman Dj., dan Ace S., 1995 : 7-9).

Untuk menjawab berbagai tantangan atau masalah di atas, maka Depdikbud menetapkan empat strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu : pemerataan dan kesempatan pendidikan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan (Wardiman Dj., dan Ace S., 1995 : 26).

Keempat strategi tersebut, di samping menjadi rujukan kinerja pendidikan, juga berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan proses pendidikan yang dilaksanakan. Salah satu masalah pendidikan yang sering mencuat kepermukaan adalah banyaknya para lulusan yang menganggur. Pengangguran ini menjadi bahan tuduhan terhadap ketidakberhasilan pendidikan dalam “memproduksi” para lulusannya. Pendidikan dipandang kurang memperhatikan kebutuhan atau tuntutan pembangunan. Menurut Soeharsono Sagir (PR, 23 April 1997) jumlah pencari kerja dari penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 1985 sebanyak 1.3 juta, tahun 1990 sebanyak 2.1 juta, dan pada tahun 1995 sebanyak 5.9 juta.

Fenomena pengangguran ini merupakan masalah nasional yang menjadi agenda pemerintah untuk menanggulangnya, karena apabila tidak tertanggulangi akan menimbulkan berbagai gejolak sosial yang mungkin berdampak negatif bagi proses pembangunan itu sendiri.

Untuk mengatasi masalah kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha (industri), dan mengantisipasi berlakunya era kesejagatan, maka pemerintah melalui Depdikbud melakukan reformasi dalam pendidikan. Reformasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran pendidikan dalam rangka mendukung pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi. Wujud reformasi itu adalah penerapan kebijakan Link and Match (Keterkaitan dan Kesepadanan) antara dunia pendidikan dengan pembangunan (dunia usaha dan industri).

Istilah Link ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana pendidikan memiliki kaitan fungsional dengan kebutuhan pasar, baik dilihat dari konsepnya, kebijaksanaannya, perencanaannya, dan pelaksanaan programnya. Sedangkan Match adalah suatu keadaan bahwa program-program yang dikembangkan, dibina, dan dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional dapat menghasilkan keluaran pendidikan

yang mampu memenuhi tuntutan para pemakai lulusan, baik dari segi jenis, jumlah, maupun yang dipersyaratkan (Wardiman Dj., dan Ace S., 1995 : 121).

Apabila Link and Match dimaknai seperti di atas, maka kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan di semua jenis dan jenjang pendidikan. Kebijakan itu hanya cocok bagi jalur pendidikan persekolahan yang berorientasi ke dunia kerja, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Walaupun begitu, bukan berarti semua program pendidikan di SMK semata-mata pengejawantahan kebijakan Link and Match, karena SMK juga mengemban misi pendidikan yang utama, yaitu mengembangkan harkat dan martabat peserta didik yang berkepribadian utuh.

Kebijakan Link & Match diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), melalui program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Program PSG ini merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

Penerapan program PSG di Indonesia merupakan hasil adopsi terhadap program Dual System (DS), atau Dual Vocational Training System, dari Jerman. Program ini merupakan suatu upaya untuk mengkombinasikan antara latihan, atau praktek kerja di perusahaan dengan tugas-tugas belajar di sekolah kejuruan. Dengan kata lain, program ini merupakan suatu upaya untuk menjembatani transisi antara sekolah dengan dunia kerja (Antoine Schwartz, 1986 : i).

Adapun penerapan program PSG di Indonesia dimulai pada tahun pelajaran 1994/1995. Sampai tahun 1995/1996 program PSG ini telah berjalan di 505 SMK yang bermitra dengan 11.214 Industri/Perusahaan, dan melibatkan 62.487 siswa. Sedangkan pada tahun 1996/1997 program PSG ini telah diselenggarakan di 720 SMK Negeri (Z.A. Achmady, 1996).

SMK sebagai pendidikan kejuruan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, yang sementara ini mutunya masih rendah, karena 70 % dari mereka berlatar belakang pendidikan sekolah dasar (Data Biro Pusat Statistik tahun 1990, dalam Mochtar Buchori, 1995 : 31). Kondisi ini sangatlah tidak

menguntungkan bagi posisi Indonesia dalam menghadapi kompetisi global. Mengenai pentingnya peranan SMK ini, Wardiman Djojonegoro (Depdikbud, tt : 2) mengemukakan sebagai berikut.

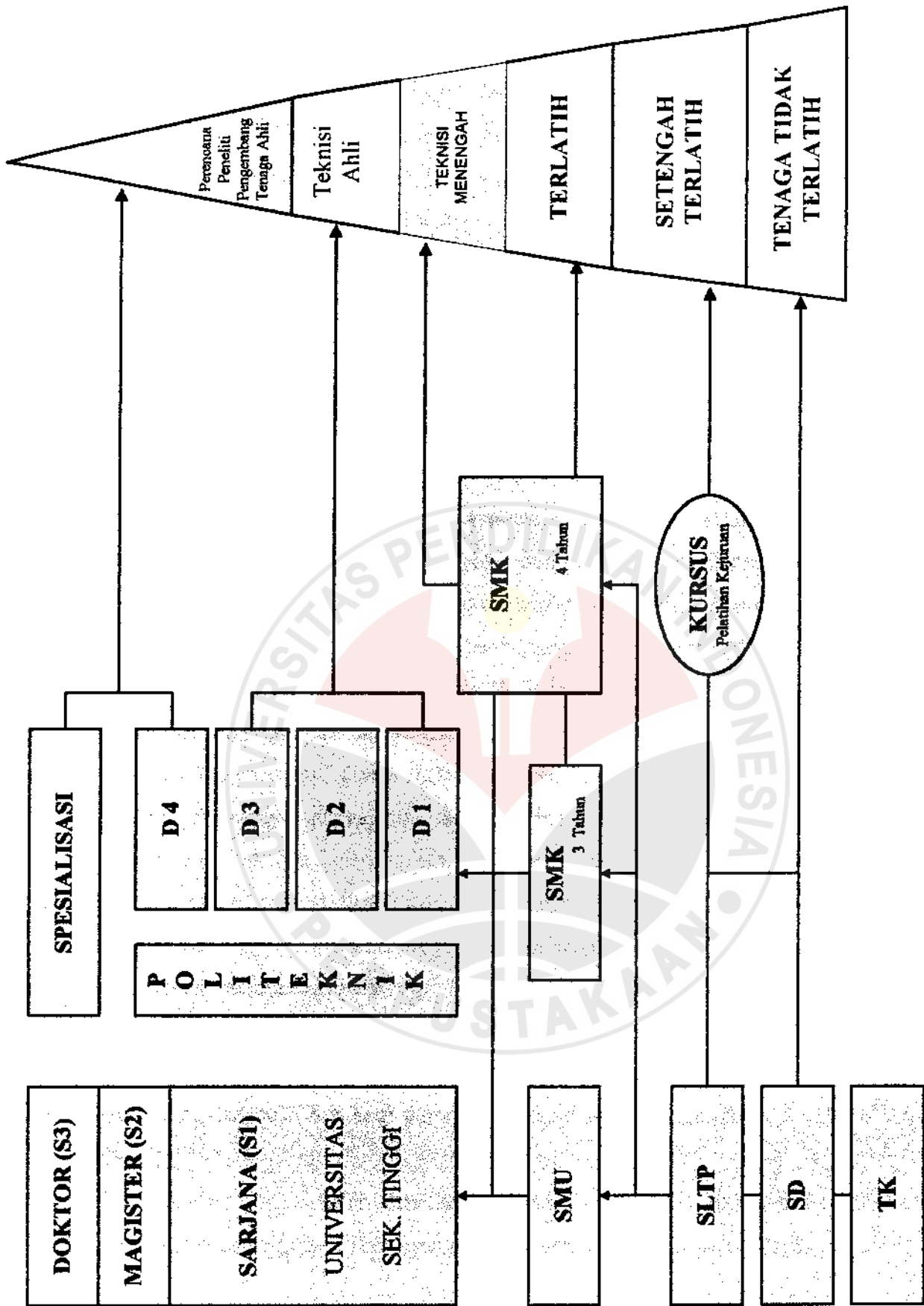
Pendidikan dan pelatihan kejuruan memiliki peranan penting dalam pembangunan Indonesia, khususnya pada fungsi pembangunan sumberdaya manusia, sesuai dengan amanat GBHN'93. Peranan dan fungsi ini terasa semakin penting dalam menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan AFTA (Asean Free Trade Area) pada tahun 2003, dan APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) pada tahun 2020.

Para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, apabila dikaitkan dengan sistem ketenagakerjaan di Indonesia, mereka akan memasuki jabatan-jabatan sebagai tenaga kerja terlatih dan teknisi menengah (lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di halaman berikut).

Berdasarkan antisipasi kebutuhan tenaga kerja yang sangat beragam bagi berbagai sektor pembangunan, khususnya untuk mempersiapkan para teknisi menengah, maka pemerintah telah berupaya untuk membuka berbagai jenis sekolah kejuruan. Bertitik tolak dari analisis kebutuhan akan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas pembangunan, dan perkembangan persaingan global, maka para lulusan SMK diharapkan memiliki kualitas pribadi sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan SMK yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.
2. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri.
3. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.
4. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif, dan kreatif (Depdikbud, 1993 : 1).

Oleh karena SMK merupakan sub sistem pendidikan nasional, maka para lulusannya di samping dituntut memiliki kualitas pribadi seperti tercantum dalam tujuan di atas, juga mereka dituntut untuk memiliki karakteristik pribadi yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu (1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) berbudi pekerti luhur, (3) memiliki pengetahuan dan keterampilan, (4) memiliki



Bagan 1.1 Keterkaitan antara Pendidikan Kejuruan dengan Sistem Ketenagakerjaan (Depdikbud, tt., : 9)

kesehatan jasmani dan rohani, (5) memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, dan (6) memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, dan kebangsaan (Undang-undang No.2, Tahun 1989).

Tujuan pendidikan di atas, mengandung implikasi bahwa misi SMK tidak semata-mata mempersiapkan para lulusannya agar memiliki kemampuan profesional dalam bidang pekerjaan tertentu, atau kualitas pribadi yang menyangkut aspek akademik-intelektual, melainkan juga aspek non akademik-emosional, sosial, dan moral-spiritual.

Berkenaan dengan peranan aspek emosional, Daniel Goleman (1995 : 36) mengemukakan tentang banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang yang cerdas emosionalnya –yang mengetahui dan mampu mengelola perasaan-perasaannya dengan baik, dan yang mampu membaca perasaan orang lain secara efektif-- memiliki keuntungan dalam berbagai aspek kehidupannya. Mereka juga lebih memungkinkan untuk mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, dan menguasai kebiasaan berpikir yang mendorong produktivitas dirinya. Sedangkan orang yang tidak mampu mengontrol emosinya, akan mengalami pertarungan batin yang dapat mensabotase (merampas) kemampuannya untuk berkonsentrasi bekerja dan berpikir jernih.

Berdasarkan pemikiran bahwa lulusan SMK perlu memiliki karakteristik pribadi yang utuh, maka proses pendidikan di SMK tidaklah memadai, jika orientasinya hanya terfokus kepada upaya pengajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan profesional, melainkan secara simultan harus dibarengi dengan upaya pendidikan lainnya yang menyentuh pengembangan kepribadian siswa, yaitu bimbingan dan konseling. Sebagaimana dimaklumi, bahwa ada tiga komponen upaya pendidikan, yaitu : (1) Bimbingan, (2) Pengajaran, dan (3) Pelatihan. Ketiga komponen ini tercantum dalam definisi pendidikan, yaitu bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang" (UU No.2 tahun 1989).

Bimbingan sebagai salah satu kegiatan pendidikan memiliki posisi strategis dalam mengembangkan pribadi siswa yang tidak tersentuh oleh kegiatan pengajaran dan

latihan. Program bimbingan mempunyai kepedulian membantu para siswa dalam rangka mengembangkan potensi dirinya, dan memecahkan masalah atau kesulitan yang dialaminya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 pasal 27 dikemukakan, bahwa "Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan".

Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi dimaksudkan agar peserta didik : (1) mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri (fisik dan psikis), (2) menerimanya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan dimaksudkan agar peserta didik : (1) mengenal lingkungan (fisik, sosial, budaya, dan spiritual) secara objektif, (2) menerima berbagai kondisi lingkungan itu secara positif dan dinamis pula, (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut, dan (4) memanfaatkan sebesar-besarnya untuk mengembangkan diri secara mantap dan berkelanjutan. Sedangkan bimbingan dalam rangka merencanakan masa depan dimaksudkan agar para peserta didik mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang masa depannya sendiri, baik yang menyangkut bidang pendidikan, karir, maupun bidang budaya/keluarga/kemasyarakatan (Depdikbud, 1994:1).

Penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di SMK bertujuan agar para siswa mampu mencapai atau menguasai tugas-tugas perkembangannya, yaitu : (1) mencapai kematangan dalam beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) mencapai kematangan dalam hubungan antara teman sebaya (pria atau wanita), dan kematangan dalam peranannya sebagai pria atau wanita, (3) mencapai kematangan emosional, (4) mencapai kematangan pertumbuhan jasmaniah yang sehat, (5) mencapai kematangan dalam pilihan karir kejuruan, (6) mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri, baik secara emosional, intelektual, maupun ekonomi, (7) mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan berkeluarga, (8) mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual, dan (9) mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan bangsa, serta sebagai warga negara (Depdikbud, 1995:4).

Kualitas pribadi di atas, menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling mempunyai kepedulian untuk membantu para siswa atau peserta didik agar mampu mengembangkan dirinya secara matang, baik menyangkut aspek intelektual, emosional, sosial, maupun moral-spiritual.

Upaya untuk membantu siswa dalam mencapai perkembangan kualitas pribadi di atas, tidaklah mudah karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan perkembangan kehidupan era kesejagatan atau kehidupan modern dewasa ini yang semakin kompleks. Disatu sisi kehidupan modern ini telah memberikan pengaruh yang positif terhadap kehidupan umat manusia, seperti semakin terfasilitasinya kebutuhan hidup; semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam penguasaan Iptek; dan semakin berkembangnya sikap interdependensi dalam kehidupan bersama. Namun disisi lain, kehidupan modern juga telah memberikan dampak sampingan yang negatif. Dampak negatif itu, seperti terjadinya pergeseran nilai dalam pola atau gaya hidup masyarakat dari pola hidup masyarakat yang sosial-religius kepada pola hidup individual-materialistis, dan sekuler (Dadang Hawari, 1997 : 165); menguatnya nilai-nilai pragmatis, dan ambiguitas berpikir (Sunaryo K., 1996 : 3); dan semakin maraknya penyimpangan perilaku di kalangan remaja : hubungan seksual sebelum nikah (free sex), meminum minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang, ecstasy, dan putau (Majalah Gatra, No.31 tahun III, 21 Juni 1997; dan No. 7, tahun IV, 3 Januari 1998).

Dampak negatif era kesejagatan tersebut, menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat, khususnya remaja telah terjadi kesenjangan atau diskontinuitas antara perilaku atau pribadi yang diharapkan dengan yang nyata. Kondisi ini merupakan tantangan yang serius bagi para pendidik, khususnya guru pembimbing, untuk senantiasa berupaya meningkatkan mutu layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Peningkatan mutu layanan perlu dilakukan, mengingat kondisi penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah dirasakan masih belum memadai, baik menyangkut aspek ketenagaan, pendekatan yang digunakan, keterlaksanaan struktur atau isi program, maupun sistem manajemennya. Padahal secara yuridis formal, layanan

bimbingan konseling di Indonesia telah dimulai sejak diberlakukannya kurikulum 1975, dan sekarang diperkokoh dengan diundangkannya Undang-undang No. 2 tahun 1989, Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990, dan SK Mendikbud No.0490/U/1992.

Masalah ini terutama dirasakan karena layanan bimbingan dan konseling selama ini cenderung lebih didasarkan atas tuntutan formal daripada atas dasar kebutuhan. Akibatnya layanan bimbingan dan konseling lebih merupakan pekerjaan administratif daripada sebagai layanan pengembangan pribadi peserta didik (Sunaryo Kartadinata, 1996 : 3).

Selanjutnya Sunaryo K., (1996 : 4) mengemukakan hasil-hasil penelitian tentang masih lemahnya sistem manajemen layanan bimbingan dan konseling di Indonesia, sebagai berikut.

1. Dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir, terutama penelitian yang dilakukan para siswa pascasarjana menunjukkan masih adanya berbagai persoalan dan kesenjangan layanan bimbingan di sekolah, baik menyangkut aspek mutu dan relevansi layanan, ketenagaan, maupun sarananya.
2. Pelaksanaan bimbingan karir di SMA (1993) di Jawa Barat menunjukkan bahwa aspek program, ketenagaan, prosedur, dan teknik, isi bimbingan, serta daya dukung lingkungan termasuk aspek manajerial, pembinaan profesional, dan sarana-prasarana merupakan aspek-aspek yang masih memerlukan penanganan secara sistemik dan sistematik, jika layanan bimbingan ingin lebih bermutu dan fungsional bagi perkembangan siswa, yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan.

Senada dengan pernyataan di atas, Kanwil Depdikbud Jawa Barat (1991) menyatakan, bahwa yang menjadi kendala penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, diantaranya : faktor ketenagaan, alokasi waktu masuk kelas, dan sarana-prasarana. Masalah ketenagaan menyangkut profesionalisme dan ratio guru pembimbing dengan siswa. Guru pembimbing yang ditempatkan di sekolah-sekolah masih sedikit sekali yang berlatar belakang program studi bimbingan dan konseling, sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut direkrut para guru bidang studi (mata pelajaran). Masalah ketenagaan ini nampaknya dialami oleh semua jenjang pendidikan, termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan informasi dari Dikmenjur Kanwil Depdikbud

Jawa Barat (1996), bahwa masih sedikit sekali SMK yang mempunyai guru pembimbing lulusan program studi BK. Sebagai contoh, dari 23 SMK (sebelumnya STM) Negeri di Jawa Barat, baru ada empat orang guru pembimbing yang lulusan S1 program studi BK. Padahal masih banyak SMK, baik negeri maupun swasta yang memerlukan guru pembimbing yang profesional. Jumlah keseluruhan SMK di Jawa Barat adalah 435 sekolah, masing-masing 67 negeri, dengan jumlah siswa 58475 orang; dan 368 swasta, dengan jumlah siswa sebanyak 220041 orang. Berdasarkan data tersebut, maka kebutuhan akan guru pembimbing berdasarkan rasio 1 : 150 (SKB Mendikbud dengan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993), adalah : $278516 : 150 \times 1$ orang guru pembimbing = 1856 orang guru pembimbing.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di salah satu SMK Negeri, di Kotamadya Bandung, pada bulan Juni 1996 menunjukkan bahwa masalah di atas, dialami juga oleh SMK tersebut. Masalah-masalah itu adalah sebagai berikut.

1. Program bimbingan belum dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata siswa.
2. Senjangnya ratio guru pembimbing dengan jumlah siswa. Guru pembimbing hanya dua orang, seorang lulusan S1 Jurusan PPB (statusnya tenaga honorer), dan seorang lagi guru kejuruan lulusan D3, sedangkan jumlah siswanya lebih dari seribu orang.
3. Pemberian layanan bimbingan masih bersifat responsif (kuratif) dan insidental, yaitu hanya menangani para siswa yang bermasalah.
4. Tidak ada jadwal khusus masuk kelas bagi guru pembimbing.
5. Masih sedikit sekali para siswa yang mau memanfaatkan layanan bimbingan. Alasan para siswa diantaranya : tidak mengetahui program bimbingan, dan merasa malu datang ke ruang bimbingan.
6. Guru pembimbing belum memiliki pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau model bimbingan dan konseling di SMK.

Berbagai masalah di atas, menjadi indikator bahwa implementasi program bimbingan dan konseling di SMK belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kondisi

ini mengisyaratkan akan pentingnya upaya penemuan suatu model bimbingan yang aplikatif, dan kontributif terhadap pengembangan potensi siswa secara optimal.

B. Masalah Penelitian

Lahirnya Undang-undang No.2, Tahun 1989; PP 28 dan 29, Tahun 1990; dan SK Mendikbud No.0490/U/1992, semakin memperkuat posisi Bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan nasional, dan sebagai bukti pengakuan atau kepedulian pemerintah akan pentingnya pelaksanaan program bimbingan dan konseling di Sekolah, khususnya di Sekolah Menengah kejuruan (SMK).

Yang menjadi dasar pertimbangan atau pemikiran tentang penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah, khususnya di SMK, bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum atau ketentuan dari "atas", namun yang lebih penting adalah pertimbangan tentang upaya untuk membantu siswa agar mampu mengembangkan dirinya secara optimal.

Siswa SMK sebagai individu sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi (becoming), yaitu berkembang ke arah kematangan. Untuk mencapai kematangan tersebut, siswa memerlukan bimbingan, karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Di samping itu terdapat suatu "keniscayaan", bahwa proses perkembangan individu tidak selalu berlangsung secara mulus, atau steril dari masalah. Dengan kata lain, proses perkembangan itu tidak selalu berjalan dalam alur yang linier, lurus, atau searah dengan potensi, harapan, dan nilai-nilai yang dianut.

Perkembangan siswa tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis, maupun sosial budaya. Blocher (1987 : 15) mengatakan bahwa people do not grow and develop in a vacuum. Perubahan lingkungan yang rumit dan sulit diprediksi dapat mengakibatkan diskontinuitas perkembangan individu. Menurut Blocher (1987 : 61) dalam masyarakat modern, cepat atau lambat, individu akan mengalami diskontinuitas

perkembangan dalam bertransaksi dengan lingkungannya. Terjadinya diskontinuitas perkembangan disebabkan oleh adanya tuntutan dari lingkungan yang tidak koheren dengan kemampuan, atau kondisi pribadi individu. Diskontinuitas perkembangan itu berupa stagnasi (kemandegan) kualitas perkembangan, atau penyimpangan perilaku.

Diskontinuitas perkembangan atau kesenjangan antara sikap, perilaku atau gaya hidup yang diharapkan dengan yang aktual, perlu dijumpatani atau diperbaiki, dengan cara memberikan peluang dan kemudahan kepada individu (peserta didik), agar dapat mengembangkan dirinya secara optimal.

Diasumsikan, bahwa perkembangan kepribadian manusia yang optimal terjadi melalui interaksi yang sehat antara organisme yang berkembang dengan budaya atau lingkungannya (Blocher, 1974 : 5).

Asumsi tersebut mengandung implikasi bahwa strategi upaya dasar bimbingan dan konseling adalah pengembangan ekologi perkembangan manusia (Ecology of Human Development), yaitu menata atau menciptakan lingkungan yang memberi kesempatan, peluang, dan kemudahan kepada peserta didik untuk belajar dan berkembang sebagai manusia yang berkepribadian mantap. Kemantapan kepribadian itu menyangkut aspek intelektual, emosional, sosial, dan moral-spiritual; atau dengan kata lain peserta didik mampu mewujudkan identitas diri (jati diri) kemakhlukannya sebagai hamba maupun khalifah Allah di muka bumi ini.

Ekologi perkembangan adalah lingkungan belajar (learning environment), yaitu lingkungan fisik, sosial, dan psikologis, dalam mana individu belajar untuk memperoleh tingkah laku baru (Blocher, 1987 : 62).

Sunaryo Kartadinata (1996 : 10) menjelaskan tentang hubungan antara lingkungan belajar dengan bimbingan, yaitu bahwa hakikat proses bimbingan dan konseling terletak pada keterkaitan antara lingkungan belajar dengan perkembangan individu, dan pembimbing atau konselor berperan sebagai fasilitator dan perekayasa lingkungan (environmental engineer).

Permasalahan layanan bimbingan dan konseling di SMK, dan fenomena diskontinuitas perkembangan peserta didik, merupakan kebutuhan nyata akan pentingnya penataan mutu program bimbingan di SMK. Apabila permasalahan ini dihubungkan dengan makna pendekatan ekologis di atas, maka yang perlu diupayakan adalah mencari atau menemukan model bimbingan dan konseling yang dapat berfungsi sebagai lingkungan belajar bagi siswa. Dalam arti, melalui bimbingan dan konseling, para siswa dapat memperoleh peluang dan kemudahan untuk mengembangkan dirinya secara optimal, juga terjembatani untuk memperbaiki diskontinuitas perkembangannya.

Pertanyaan yang muncul adalah “Sejauhmana Model Bimbingan dan Konseling dengan Pendekatan Ekologis Layak Diterapkan di SMK”? Pertanyaan inilah yang akan dijawab melalui penelitian ini.

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini diidentifikasi ke dalam tiga tahap berikut.

Tahap I, menyangkut pemotretan kondisi objektif di lapangan, yang pertanyaannya sebagai berikut.

1. Bagaimanakah deskripsi pencapaian tugas-tugas perkembangan siswa?
2. Bagaimanakah deskripsi lingkungan perkembangan siswa?
3. Bagaimanakah deskripsi implementasi aktual layanan bimbingan dan konseling di SMK?

Tahap II, menyangkut rumusan model hipotetik layanan bimbingan dan konseling di SMK, yang dikembangkan secara kolaboratif, dan didasarkan kepada temuan penelitian pada tahap pertama. Pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah rumusan model hipotetik bimbingan dan konseling dengan pendekatan ekologis, yang didasarkan kepada temuan tentang kondisi objektif di lapangan?
2. Apakah rumusan model hipotetik bimbingan dan konseling dengan pendekatan ekologis hasil uji rasional layak untuk diterapkan?

Tahap III, menyangkut uji lapangan atau implemetasi model di sekolah. Pertanyaan penelitiannya sebagai berikut.

1. Bagaimanakah rancangan dan pelaksanaan uji lapangan layanan bimbingan dan konseling dengan pendekatan ekologis di SMK?
2. Bagaimanakah rumusan model bimbingan dan konseling dengan pendekatan ekologis hasil uji lapangan di SMK?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model bimbingan dan konseling dengan pendekatan ekologis, yang dikembangkan berdasarkan kepada penelitian kondisi objektif di lapangan. Proses penemuannya berlangsung melalui pendekatan kolaboratif, bersama pihak sekolah, terutama guru pembimbing.

Secara operasional tujuan penelitian di atas, dirumuskan sebagai berikut.

1. Memperoleh data empiris mengenai pencapaian tugas-tugas perkembangan siswa, lingkungan perkembangan siswa, dan implementasi layanan bimbingan dan konseling di SMK.
2. Menemukan rumusan model hipotetik layanan bimbingan dan konseling dengan pendekatan ekologis yang didasarkan kepada hasil temuan kondisi objektif di lapangan.
3. Menemukan rumusan model “akhir” bimbingan dan konseling dengan pendekatan ekologis, hasil uji lapangan secara kolaboratif di sekolah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam hal - hal berikut.

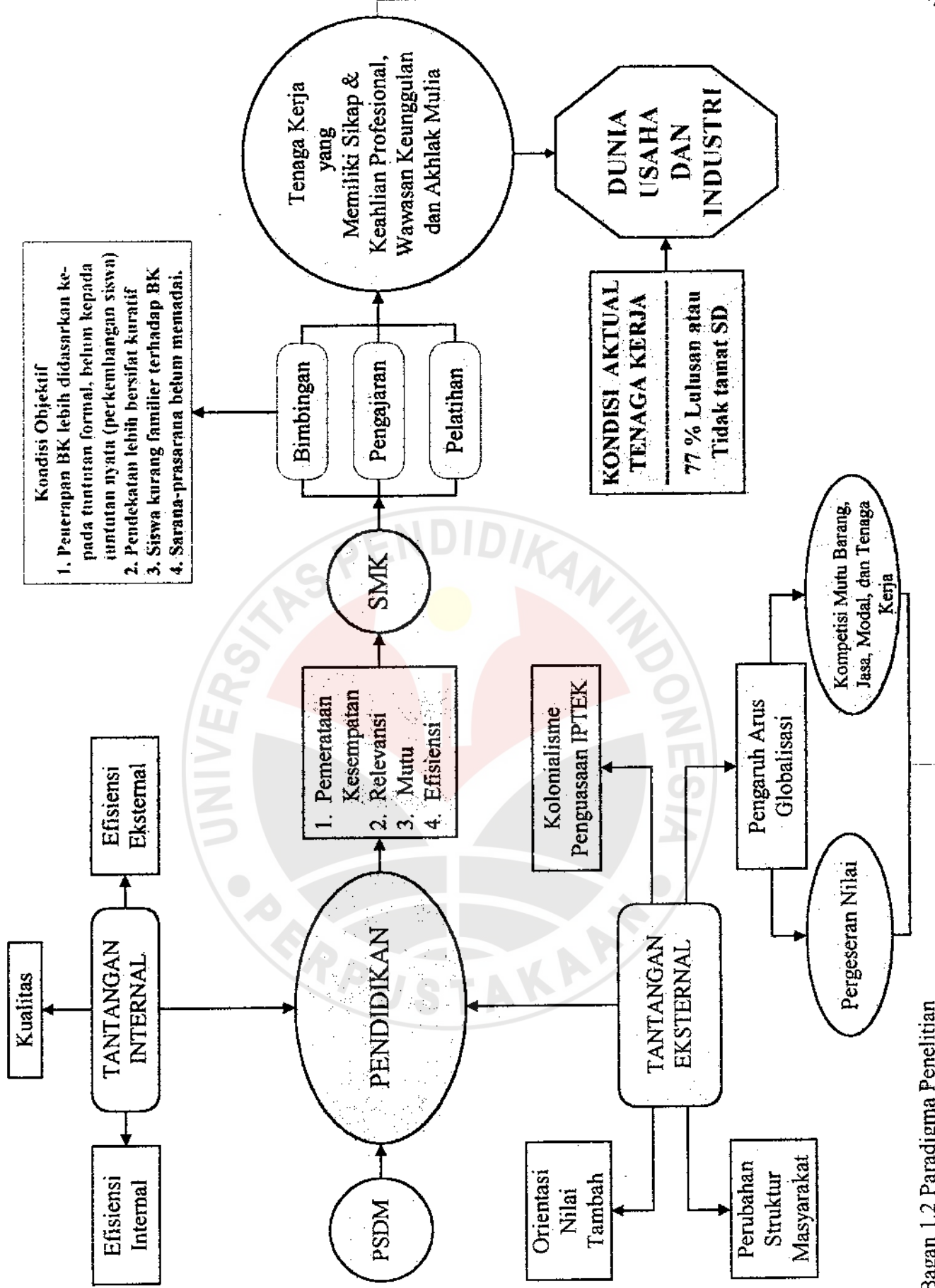
- a. Penemuan rumusan model layanan bimbingan dan konseling dengan pendekatan ekologis, yang berlandaskan kepada kebutuhan atau perkembangan siswa (siswa SMK yang sedang berada pada usia remaja) dalam keragaman lingkungannya.
- b. Penemuan konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling yang lebih terstruktur dan sistematis, yang pendekatannya lebih berorientasi kepada upaya memfasilitasi siswa dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangannya, sebagai suatu sistem kehidupan pribadi yang berdimensi biopsikososiospiritual.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis-empiris, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal-hal berikut.

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak penyelenggara pendidikan konselor atau pembimbing dalam upaya mengembangkan program pendidikan, khususnya menyangkut mata kuliah bimbingan dan konseling yang berorientasi kepada penataan ekologi perkembangan atau lingkungan belajar siswa.
- b. Sebagai alternatif model bimbingan dan konseling yang dapat diterapkan oleh guru pembimbing, dalam rangka memfasilitasi perkembangan siswa.
- c. Penemuan model yang prosesnya melalui pendekatan kolaboratif, dapat mengembangkan motivasi dan kesadaran pimpinan sekolah, guru mata pelajaran (kejuruan), dan guru pembimbing yang secara sinergi menerapkan dan mengembangkan program layanan bimbingan dan konseling sebagai komponen yang terpadu dalam program pendidikan di sekolah secara keseluruhan.

PARADIGMA PENELITIAN



Bagan 1.2 Paradigma Penelitian